

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kota Surabaya, sebagai ibu kota propinsi Jawa Timur, yang juga merupakan kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia terus menerus mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk tersebut, baik penduduk asli kota Surabaya maupun penduduk yang datang akibat arus urbanisasi menjadi salah satu penyebab bertambahnya angka pengangguran di kota Surabaya. Kota besar seperti Surabaya selalu menarik minat orang dari luar untuk datang dan mencari pekerjaan demi meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya, pada bulan Juni tahun 2013, Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar 3.166.000 jiwa, dengan jumlah pendatang dari luar kota Surabaya mencapai 28.000 jiwa lebih. Jumlah tersebut belum termasuk penduduk musiman yang tercatat 3.000 lebih, sehingga total jumlah penduduk tiap tahun meningkat tajam dengan angka pertumbuhan 50.000 lebih. Fakta tersebut berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, jumlah penduduk pada tahun 2011, jumlah penduduk mencapai 3.024.000 jiwa, kemudian bertambah di tahun 2012 mencapai 3.125.000 jiwa dan pada bulan Juni tahun 2013 mencapai 3.166.000 jiwa (lifestyle.kompasiana.com, 2013).

Sejalan dengan besarnya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk tersebut, jumlah pengangguran di kota Surabaya juga meningkat pesat. Hal ini disebabkan berbagai permasalahan seperti, rendahnya tingkat keterampilan (*skill*) dari masyarakat masyarakat desa yang pindah ke kota Surabaya atau juga adanya masyarakat yang menganggur karena di PHK-kan oleh perusahaannya meskipun mempunyai keterampilan (*skill*) yang memadai. Hingga pertengahan 2013 saja, dari sekitar 3 juta penduduk Surabaya tersebut, tercatat sebanyak 80.568 warga tidak memiliki pekerjaan. Terdapat juga tambahan pengangguran dari kalangan perempuan. Jumlah ibu rumah tangga yang tidak bekerja sebesar 542.998 orang dan pelajar atau mahasiswa 462.738 orang. Jumlah seluruhnya sekitar 1,7 juta orang. Sehingga lebih dari separuh penduduk Surabaya ini belum bisa dikategorikan mandiri dan masih bergantung pada orang lain (ekbis.sindonews.com, 2013).

Dengan banyaknya masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan atau gagal mencari peluang usaha, salah satu jalan yang mereka tempuh adalah membuka usaha menjadi Pedagang Kaki Lima (PKL) dengan modal dan keterampilan yang minim. PKL ini muncul dari akibat tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi rakyat (kecil) yang tidak mampu mendapatkan penghasilan. Keberadaan mereka semakin menjamur terutama di obyek-obyek vital perkotaan. PKL merupakan alternatif pekerjaan yang terbilang mudah dan tetap bertahan sampai saat ini. Keberadaannya seringkali juga kurang diperhatikan, padahal dalam kenyataannya kegiatan ekonomi informal ini cukup penting dalam menopang perekonomian rakyat. Keberadaan PKL tidak boleh dipandang sebelah mata. Bagi

masyarakat berpenghasilan kecil keberadaan PKL sangat dibutuhkan karena yang bisa menyediakan produk dengan harga terjangkau.

Mereka yang masuk dalam kategori PKL ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*) (Soemadi, 1993 dalam Suriatmi, 2005). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa PKL menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha PKL ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya. Tempat berjualan yang mereka pergunakan juga seadanya dengan memanfaatkan trotoar jalan, dan tempat strategis lainnya yang mendukung mereka untuk menjajakan jualannya. Menurut Limbong (2006) untuk memenuhi kebutuhan keluarga maka sebagian para penganggur terjun dalam kegiatan sektor informal seperti pedagang kaki lima (PKL), sehingga peranan sektor informal menyerap pedagang kaki lima menjadi urgen sebagai upaya untuk bertahan hidup.

PKL pada umumnya adalah *self-employed*, artinya mayoritas PKL hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana illegal atau dari supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat kecil (Hidayat, 1978, dalam Suriatmi, 2005).

Lokasi PKL sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para PKL, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para PKL berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan PKL belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat, 1978 dalam Suriatmi, 2005). Namun, pada umumnya PKL kurang memperhatikan masalah lingkungan dan faktor *hygiene* sebagai produk sampingan yang negatif. Masalah lingkungan berkaitan erat dengan kepadatan, misalnya kepadatan lalu lintas maupun kepadatan tempat. Kondisi inilah yang seringkali menjadi alasan mengapa PKL selalu dianggap sebagai permasalahan, baik kebersihan maupun kemacetan serta menjadi persoalan serius di berbagai kota besar di Indonesia, termasuk di Surabaya.

Salah satu lokasi yang dianggap strategis dan ramai dijadikan tempat berjualan oleh PKL di kota Surabaya adalah kawasan sekitar Masjid Al Akbar Surabaya. Masjid nasional ini terletak di bagian selatan kota Surabaya, tepatnya di daerah Pagesangan, dekat dengan jalan tol Surabaya-Gempol. Masjid Al Akbar diresmikan pada tanggal 10 November 2000 oleh Presiden RI yang saat itu dijabat oleh Bapak Abdurrahman Wahid. Masjid Al Akbar berdiri di atas tanah seluas 11,2 hektar dengan luas bangunan 28.509 meter persegi. Kesan unik dari bangunan ini terletak pada desain kubah masjid yang unik seperti struktur daun dengan kombinasi warna hijau dan biru yang nampak dari kejauhan terkesan damai dan sejuk, masjid berlantai dua ini dilengkapi lift dan menara.

Berbagai keindahan dan keunikan yang dimiliki masjid Al Akbar ini membuatnya menjadi salah satu tujuan utama wisata religi di Surabaya, dan tidak

pernah sepi dari pengunjung atau wisatawan, terlebih pada hari libur. Hal ini tentu sedikit aneh bagi banyak orang yang berpandangan bahwa masjid hanya sebagai tempat beribadah. Namun kenyataannya, masjid Al Akbar memang telah menjadi destinasi wisata terkenal di Surabaya. Masjid Nasional Al Akbar memang terbuka untuk umum, bahkan bagi seorang non muslim sekalipun, boleh juga berkunjung. Ramainya jumlah pengunjung di Masjid Al Akbar inilah yang kemudian menarik minat pedagang kaki lima (PKL) untuk berjualan di sekitar area Masjid Al Akbar Surabaya.

Keberadaan para pedagang kaki lima di sekitar area masjid Al Akbar tersebut ternyata juga dibutuhkan oleh para pengunjung masjid, terbukti dengan larisnya dagangan yang mereka jajakan. Setiap hari, para PKL yang diwawancarai penulis menyebutkan bahwa omzet mereka berkisar antara 300 hingga 800 ribu rupiah, yang sedikit banyak bergantung dari kondisi cuaca. Bahkan di berbagai alamat *website* yang merekomendasikan Masjid Al Akbar Surabaya sebagai tujuan wisata seringkali menyebutkan bahwa di Masjid Al Akbar Surabaya seorang pengunjung bisa mencoba bermacam kuliner atau bisa hanya sekedar “nongkrong” di kawasan tersebut, karena di sekeliling masjid banyak yang berjualan selayaknya pasar malam. Khusus pada minggu pagi di beberapa jalan ditutup dikhususkan untuk orang-orang yang berolah raga. Gambaran tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan PKL telah menjadi bagian tak terpisahkan dari Masjid Al Akbar.

Dalam perkembangannya, keberadaan PKL di Masjid Al Akbar ini, seperti PKL-PKL di tempat lain, dianggap menjadi masalah. Keberadaan mereka

dianggap mengganggu keindahan, ketertiban dan kebersihan lingkungan masjid, bahkan seringkali juga dianggap mengganggu kekhusyukan orang yang beribadah di Masjid Al Akbar tersebut. Hal ini kemudian beberapa kali menimbulkan konflik antara PKL dengan manajemen Masjid Al Akbar Surabaya. Pihak manajemen Masjid Al Akbar Surabaya beberapa kali telah membuat laporan kepada kepolisian terkait keberadaan PKL Pagesangan yang dikelola warga setempat karena dianggap mengganggu kekhidmatan umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah di Masjid Al-Akbar. Pada bulan Juli 2011, misalnya, Direktur Utama Masjid Al Akbar Surabaya, membuat laporan ke Polrestabes Surabaya. Yang dilaporkan adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di belakang Masjid Al Akbar Surabaya. Laporan itu disebutkan jika para PKL ini telah mengganggu kekhusyukan beribadah bagi jamaah Masjid Al Akbar Surabaya. Padahal para PKL tersebut sejak beberapa waktu lalu ditertibkan Kecamatan Gayungan dan kini menempati lahan milik Pemkot Surabaya.

Adanya laporan-laporan dari pihak manajemen tersebut, menurut Ketua Paguyuban PKL Makmur (P2KLM) membuat para PKL tak habis mengerti. Sebab setelah mereka ditertibkan kini sudah tak berjualan lagi di badan jalan sehingga tak mengganggu lalu lintas dan jamaah Masjid Al Akbar Surabaya. Alasan yang dijadikan bahan laporan ke polisi ini dinilai juga terlalu mengada-ada. Sebab selain para PKL yang ada di sentra PKL belakang Masjid Al Akbar Surabaya ini masih ada lagi sentra PKL lainnya yang ada di jalan depan Masjid Al Akbar Surabaya. Hanya saja para PKL yang ada di depan Masjid Al Akbar Surabaya ini justru merupakan binaan dari Masjid Al Akbar Surabaya sendiri

meskipun menempati fasilitas umum. Gedung serbaguna yang ada di dalam masjid juga disewakan untuk umum seperti resepsi pernikahan, tapi tidak dianggap mengganggu kekhusukan (www.surabayakita.com, 2011).

Manajemen Masjid Al Akbar Surabaya kembali bersitegang dengan PKL Makmur Pagesangan di awal bulan November 2014 ini. Dengan alasan agar lokasi tampak bersih dan PKL nyaman berjualan, manajemen Masjid Al-Akbar tiba-tiba melaksanakan kegiatan pengurangan material jenis sirtu di lahan milik Pemkot Surabaya, yang kabarnya untuk pemasangan paving. Kegiatan ini kemudian mendapat perlawanan dari warga setempat yang tergabung dalam PKL Makmur Pagesangan. Kegiatan tersebut dinilai para PKL merupakan upaya manajemen Masjid Al Akbar untuk menguasai lahan milik Pemkot tersebut. Sebelumnya, kasus ini diawali dari pihak Masjid Al Akbar yang memasang pengumuman hak guna lahan, dan kini manajemen Masjid Al Akbar Surabaya kembali memasang kunci besar di pagar pintu masuk area PKL Makmur Pagesangan yang berlokasi di sebelahnya. Tindakan saling rusak dan saling copot pagarpun terjadi dan kini situasinya mulai kembali memanas. Memang, di sekitar area Masjid Agung terdapat dua kawasan PKL, satu yang dikelola oleh Masjid Agung dan sebelahnya adalah PKL mandiri yang menempati lahan milik Pemerintah Kota Surabaya (m.beritajatim.com, 2014).

Dari gambaran di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan perdagangan PKL di area Masjid Al Akbar tersebut merupakan lahan usaha yang baik bagi pedagang kaki lima karena sulitnya mencari pekerjaan di sektor formal dengan pendidikan dan *skill* yang mereka miliki. Namun, keberadaan mereka malah kurang

dikehendaki oleh pengambil kebijakan yaitu pihak manajemen Masjid Al Akbar Surabaya. Persoalan inilah yang mendorong pedagang kaki lima untuk dapat beradaptasi sehingga mampu berinteraksi dengan baik dengan lingkungannya, serta selalu memiliki strategi agar tetap bisa berjualan demi keberlangsungan hidup keluarga mereka serta strategi dalam menghadapi berbagai masalah dengan manajemen Masjid Al Akbar Surabaya.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong para PKL untuk berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya?
2. Bagaimanakah strategi adaptasi dari para PKL untuk tetap dapat berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan-alasan yang mendorong para PKL untuk berjualan di area Masjid Al Akbar Surabaya, meskipun banyak kendala dari berbagai pihak. Selain itu juga untuk mengetahui strategi adaptasi para PKL tersebut untuk tetap dapat berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kehidupan pedagang kaki lima, sehingga pemimpin lembaga atau institusi dapat mengambil langkah-langkah dalam hal penanganan masalah yang ditimbulkan oleh pedagang kaki lima.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan yang lebih tentang strategi adaptasi pedagang kaki lima, kemudian dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu antropologi.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan peneliti dalam pembuatan kajian ilmiah dan memahami realitas sosial pedagang kaki lima, khususnya serta diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Sektor Informal

Istilah sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil. Namun, menurut Safaria,dkk (2003) kalangan akademisi masih memperdebatkan teori dan konsep mengenai sektor informal ini. Ada yang menganggap bahwa sektor informal muncul karena terbatasnya kapasitas industri-industri formal dalam menyerap tenaga kerja yang ada, sehingga terdapat kecenderungan bahwa sektor informal ini muncul di

pinggiran kota besar. Sebagian yang lain menganggap bahwa sektor informal ini sudah lama ada. Ini adalah pandangan dari perspektif yang “dualistik”, yang melihat sektor “informal” dan “formal” sebagai dikotomi antara model ekonomi tradisional dan modern.

Menurut Safaria, dkk (2003) sektor informal dipandang sebagai kekuatan yang semakin signifikan bagi perekonomian lokal dan global, seperti yang dicantumkan dalam pernyataan visi WIEGO (*Woman In Informal Employment Globalizing and Organizing*) yaitu mayoritas pekerja di dunia kini bekerja di sektor informal dan proporsinya terus membengkak sebagai dampak dari globalisasi: mobilitas capital, restrukturisasi produksi barang dan jasa, dan deregulasi pasar tenaga kerja mendorong semakin banyak pekerja ke sektor informal.

Menurut ILO (*Internasional Labour organization*) dalam Yustika (2000) yang dimaksud sektor informal adalah aktivitas-aktivitas ekonomi yang antara lain ditandai dengan mudah untuk dimasuki, bersandar pada sumber daya lokal, usaha milik sendiri, operasinya dalam skala kecil, padat karya dan teknologinya bersifat adaptif, ketrampilan diperoleh dari luar sistem sekolah formal, dan tidak terkena langsung oleh regulasi dan pasarnya bersifat kompetitif.

Menurut Breman (dalam Manning, 1991) bahwa sektor informal merupakan suatu istilah yang mencakup dalam istilah “usaha sendiri”, merupakan jenis kesempatan kerja yang kurang terorganisir, sulit dicacah, sering dilupakan dalam sensus resmi, persyaratan kerjanya jarang dijangkau oleh aturan hukum. Mereka adalah kumpulan pedagang, pekerja yang tidak terikat dan tidak terampil,

serta golongan-golongan lain dengan pendapatan rendah dan tidak tetap, hidupnya serba susah dan semi kriminal dalam batas-batas perekonomian kota.

Kemudian menurut Hart (dalam Manning, 1991) mereka yang terlibat dalam sektor informal pada umumnya miskin, kebanyakan dalam usia kerja utama (*prime age*), berpendidikan rendah, upah yang diterima di bawah upah minimum, modal usaha rendah, serta sektor ini memberikan kemungkinan untuk mobilitas vertikal. Menurut Breman (dalam Manning, 1991) sektor informal memiliki ciri-ciri sebagai berikut: padat karya, tingkat produktivitas yang rendah, pelanggan yang sedikit dan biasanya miskin, tingkat pendidikan formal yang rendah, penggunaan teknologi menengah, sebagian besar pekerja keluarga dan pemilik usaha oleh keluarga, gampangnya keluar masuk usaha, serta kurangnya dukungan dan pengakuan pemerintah.

1.5.2. Pedagang Kaki Lima

Perdagangan kaki lima (PKL) merupakan salah satu alternatif dalam mengurangi angka pengangguran. Tidak sebandingnya antara lapangan pekerjaan dengan angka para pencari kerja menyebabkan sebagian masyarakat menciptakan lapangan pekerjaan yang bersifat informal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sektor informal tersebut tidak membutuhkan syarat-syarat keahlian dan modal yang tinggi (Maryatmo dan Susilo, 1996) serta tidak terikat dengan waktu dan tempat (Kurniadi dan Tangkilisan, 2001). Kehadirannya pun sering menyalahi aturan penataan ruang publik.

Menurut Bromley (dalam Manning, 1991) pedagang kaki lima (*street trading*) adalah salah satu pekerjaan yang paling nyata dan penting di kebanyakan kota di Afrika, Asia, Timur Tengah atau Amerika Latin. Namun, meskipun penting pedagang-pedagang kaki lima hanya sedikit saja memperoleh perhatian akademik dibandingkan dengan kelompok pekerjaan utama yang lain. Pedagang kaki lima biasanya digambarkan sebagai perwujudan pengangguran tersembunyi atau setengah pengangguran yang luas dan pertumbuhan yang luar biasa dari jenis pekerjaan sektor tersier yang sederhana di Kota di Dunia Ketiga.

Menurut Alisyahbana (2005) berdasarkan penelitiannya di kota Surabaya telah mengkategorikan pedagang kaki lima menjadi 4 tipologi. Keempat tipologi tersebut adalah:

1. Pedagang kaki lima murni, yang masih bisa dikategorikan pedagang kaki lima adalah dengan skala modal terbatas, dikerjakan oleh orang yang tidak mempunyai pekerjaan selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, tenaga kerja yang bekerja adalah anggota keluarga.
2. Pedagang kaki lima yang hanya berdagang ketika ada bazar (pasar murah/pasar rakyat, berjualan di Masjid pada hari Jumat, halaman kantor-kantor).
3. Pedagang kaki lima yang sudah melampaui ciri pertama dan kedua, yakni pedagang kaki lima yang telah mampu mempekerjakan orang lain. Ia mempunyai karyawan, dengan membawa barang dagangannya dan peraganya dengan mobil, dan bahkan ada yang mempunyai stan lebih dari satu tempat.

Termasuk dalam tipologi ini adalah pedagang kaki lima yang berpindah-pindah tempat dengan menggunakan mobil bak terbuka.

4. Pedagang kaki lima yang termasuk pengusaha kaki lima. Mereka hanya mengkoordinasikan tenaga kerja yang menjualkan barang-barangnya. Termasuk pedagang kaki lima jenis ini yaitu pedagang kaki lima yang mempunyai toko, dimana tokonya berperan sebagai grosir yang menjual barang dagangannya kepada pedagang kaki lima tak bermodal dan barang yang diambil baru dibayar setelah barang tersebut laku.

Ciri pedagang kaki lima yang juga sangat menonjol adalah bersifat subsistensi. Mereka berdagang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apa yang diperoleh pada hari ini digunakan sebagai konsumsi hari yang sama pula bagi semua anggota keluarganya dengan demikian kemampuan untuk menabung juga rendah. Kondisi ini menyebabkan para pedagang kaki lima menjadi sangat khawatir terhadap berbagai tindakan aparat yang dapat mengganggu kehidupan subsistensinya.

Penyebaran PKL dalam melakukan kegiatan usahanya terbagi menjadi dua bentuk:

1. Berbentuk linier:

Pertumbuhan atau penyebaran PKL memanjang sepanjang jalur utama, sehingga mereka menggelar dagangan di atas trotoar atau di pinggir-pinggir jalan sehingga mengganggu pergerakan dari masyarakat.

2. Berbentuk aglomerasi:

PKL menggelar dagangannya secara mengelompok dan terpusat di suatu kawasan tertentu atau suatu kegiatan tertentu.

Secara garis besar karakteristik PKL (Ismawan, 2002), digambarkan sebagai berikut:

1. Informalitas. Sebagian besar PKL bekerja diluar kerangka legal dan pengaturan yang ada, maka keberadaan mereka pun tak diakui oleh pemerintah setempat.
2. Mobilitas. Aspek informalitas dari PKL juga membawa konsekuensi tiadanya jaminan keberlangsungan aktifitas yang dijalani, sehingga usaha ini merupakan sektor yang relatif mudah dimasuki dan ditinggalkan. Apabila terdapat peluang maka dengan banyak pelaku yang turut serta, sebaliknya apabila terjadi perubahan peluang ke arah negatif pelakunya akan berkurang.
3. Kemandirian. Umumnya para pedagang mencari modal sendiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lembaga keuangan lokal dengan berbagai peraturan dan prinsip keberhati-hatian membatasi kemungkinan berhubungan dengan para PKL, karena tiadanya jaminan yang dimiliki mereka.
4. Hubungan dengan sektor formal. Meskipun kehadiran mereka tidak diakui, namun peranan mereka dalam membantu sektor formal sangatlah besar, terlebih lagi dalam hal pendistribusian barang kepada konsumen.

1.5.3. PKL Sebagai Salah Satu Sektor Informal

Krisis moneter yang melanda di tahun 1997-1998 ternyata lebih berpengaruh terhadap pertumbuhan sektor formal yang biasa menggunakan modal besar dan bervaluta asing, tetapi bagi usaha kecil yang lebih bersifat informal krisis moneter tidak mempengaruhi perkembangannya, justru pertumbuhannya semakin meningkat (Mubyarto, 2002). Karena sektor informal relatif mudah untuk dimasuki oleh pelaku usaha yang baru, dan mempunyai peran dalam meminimalkan dampak sosial dari krisis ekonomi, khususnya dalam persoalan penyerapan tenaga kerja (Brata, 2003). Dari gambaran di atas dapat diketahui bahwa sektor informal adalah pertumbuhan ekonomi yang berasal dari masyarakat bawah, bisa juga disebut dengan ekonomi rakyat. Kegiatan yang digeluti oleh masyarakat, terbagi menjadi beberapa bagian yaitu (Ismawan 2002):

1. Kegiatan-kegiatan primer dan sekunder, yaitu masyarakat sebagai produsen barang tertentu;
2. Kegiatan-kegiatan tersier, yaitu lebih kearah jasa penyewaan;
3. Kegiatan-kegiatan distribusi, yaitu sebagai perantara produsen dan konsumen, biasanya diperankan oleh para pedagang.
4. Kegiatan-kegiatan jasa selain distributor.

Di antara kegiatan yang disebutkan di atas, kegiatan yang dominan dipilih masyarakat adalah kegiatan distribusi, yaitu sebagai penyalur barang dari produsen kepada konsumen, dan bersifat informal karena tidak memiliki badan hukum yang jelas sehingga kehadiran sektor informal oleh pemerintah tidak diakui sebagai penggerak perekonomian masyarakat, tetapi lebih dianggap sebagai

ancaman bagi penataan ruang. Meski kehadirannya dianggap melanggar, para PKL dikenakan retribusi yang menyebabkan mereka merasa dilegalisasi sehingga pertumbuhan perdagangan menjadi pesat (Perwira, 2004). Umumnya PKL tidak mendapatkan subsidi apapun dari pemerintah, modal yang dikeluarkan diperoleh dari meminjam sanak famili atau orang-orang terdekat.

Menurut BPS, karakteristik sektor informal termasuk kegiatan PKL adalah sebagai berikut: 1) Mandiri. Pada umumnya usaha yang dilakukan tanpa ada bantuan dari pekerja/buruh, artinya dikerjakan langsung oleh pemimpin perusahaan. 2) Modal. Modal yang dikeluarkan dalam melakukan usaha berasal dari milik sendiri. 3) Waktu. Rata-rata waktu kerja sektor informal dalam sehari, paling lama adalah 9 jam. 4) Pinjaman. Dalam menjalankan usaha mayoritas, mereka tidak memanfaatkan bantuan pinjaman pemerintah ataupun bank lokal. Tetapi mencari pinjaman lainnya, yang berasal dari keluarga atau kerabat terdekat. Beberapa alasan, mereka yang tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah adalah ketidak tahuan adanya bantuan, ketidak tahuan dalam prosedur pengajuan atau penerimaan bantuan dan penolakan proposal dari lembaga yang bersangkutan.

Kegiatan ekonomi informal perkotaan kehadirannya membawa beberapa permasalahan bagi perkotaan di antaranya, yaitu (URDI 2005): 1) Penyalahgunaan penggunaan peruntukan ruang publik. Munculnya ancaman keamanan lingkungan. 2) Terabaikannya kebersihan lokasi sektor informal. 3) Adanya eksplotiasi anak-anak usia sekolah. 4) Terjadinya persaingan yang tidak sehat antara sektor informal dan sektor formal. 5) Rentannya pemerasan oleh pihak-pihak tertentu karena ketiadaan perlindungan hukum. 6) Munculnya setoran

ilegal (pungutan liar) yang mesti dibayarkan kepada pihak tertentu di luar setoran resmi.

Masalah yang muncul dari kehadiran PKL bagi perkotaan, antara lain: 1) Mengganggu kegiatan perkotaan lainnya sehingga menimbulkan kesemrawutan. 2) Tidak tertatanya dengan baik dikarenakan tidak tersentuh oleh hukum. 3) Sulit di prediksi pertumbuhannya sehingga sulit untuk ditata. Adapun keuntungannya antara lain: 1) Mampu menyediakan lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja. 2) Menyediakan barang yang murah bagi masyarakat. 3) Bisa menjadi cikal bakal sektor formal.

1.5.4. Adaptasi

Konsep adaptasi datang dari dunia biologi, dimana ada 2 poin penting yaitu *evolusi genetik*, dimana berfokus pada umpan balik dari interaksi lingkungan, dan *adaptasi biologi* yang berfokus pada perilaku dari organisme selama masa hidupnya, dimana organisme tersebut berusaha menguasai faktor lingkungan, tidak hanya faktor umpan balik lingkungan, tetapi juga proses kognitif dan level gerak yang terus-menerus. Adaptasi juga merupakan suatu kunci konsep dalam 2 versi dari teori sistem, baik secara *biological*, perilaku, dan sosial yang dikemukakan oleh Bennet (1996).

Asumsi dasar adaptasi berkembang dari pemahaman yang bersifat evolusionari yang senantiasa melihat manusia selalu berupaya untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan alam sekitarnya, baik secara biologis/genetik maupun secara budaya. Proses adaptasi dalam evolusi melibatkan

seleksi genetik dan varian budaya yang dianggap sebagai jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan. Adaptasi merupakan juga suatu proses yang dinamik karena baik organisme maupun lingkungan sendiri tidak ada yang bersifat konstan/tetap (Hardestry, 1977).

Pada dasarnya menurut Drever (1952), adaptasi memiliki pengertian yaitu suatu proses kepekaan organisme terhadap suatu kondisi atau keadaan, baik yang dikerjakan atau yang dipelajari. Adaptasi adalah suatu proses oleh suatu populasi atau individu terhadap kondisi lingkungan yang berakibat populasi atau individu tersebut *survive* (bertahan) atau tersingkir. Menurut Kaplan (2002) adaptasi merupakan satu dari dua konsep sentral dalam teori ekologi budaya. Suatu ciri dalam ekologi budaya adalah perhatian mengenai adaptasi pada dua tataran: pertama, sehubungan dengan cara sistem budaya beradaptasi terhadap lingkungan totalnya, kedua, sebagai konsekuensi adaptik sistemik itu perhatian terhadap cara institusi dalam suatu budaya beradaptasi atau saling menyesuaikan diri. Umumnya ekologi budaya menekankan dipentingkannya proses adaptasi akan memungkinkan kita dapat melihat cara kemunculan, pemeliharaan, dan transformasi berbagai konfigurasi budaya.

Adaptasi adalah suatu penyesuaian pribadi terhadap lingkungan, penyesuaian ini dapat berarti mengubah diri pribadi sesuai dengan keadaan lingkungan, juga dapat berarti mengubah lingkungan sesuai dengan keinginan pribadi (Gerungan, 1991). Adaptasi sendiri memiliki beberapa macam yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi kultural (Soemarwoto, 2004). Pada penelitian ini digunakan konsep dari adaptasi kultural. Adaptasi kultural

adalah adaptasi dalam bentuk kelakuan yang dilakukan individu terkait pranata sosial-budaya di sekitarnya.

Bennet (1976) dan Pandey (1993) dalam Helmi dan Satria (2012), memandang adaptasi sebagai suatu perilaku responsif manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungan yang terjadi. Perilaku responsif tersebut memungkinkan mereka dapat menata sistem-sistem tertentu bagi tindakan atau tingkah lakunya, agar dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang ada. Perilaku tersebut di atas berkaitan dengan kebutuhan hidup, setelah sebelumnya melewati keadaan-keadaan tertentu dan kemudian membangun suatu strategi serta keputusan tertentu untuk menghadapi keadaan-keadaan selanjutnya. Dengan demikian, adaptasi merupakan suatu strategi yang digunakan oleh manusia dalam masa hidupnya guna mengantisipasi perubahan lingkungan baik fisik maupun sosial (Alland 1975; Barlett 1980 dalam Helmi dan Satria, 2012).

Menurut Suparlan (1993) adaptasi itu sendiri pada hakikatnya adalah suatu proses untuk memenuhi syarat-syarat dasar untuk tetap melangsungkan kehidupan. Syarat-syarat tersebut mencakup: 1) Syarat dasar alamiah-biologi (manusia harus makan dan minum untuk menjaga kestabilan temperatur tubuhnya agar tetap berfungsi dalam hubungan harmonis secara menyeluruh dengan organ-organ tubuh lainnya). 2) Syarat kewajiban (manusia membutuhkan perasaan tenang yang jauh dari perasaan takut, keterpencilan, gelisah dan lain-lain). 3) Syarat dasar sosial (manusia membutuhkan hubungan untuk dapat melangsungkan keturunan, untuk dapat mempertahankan diri dari serangan musuh, dan lain-lain).

Adaptasi merupakan salah satu bagian dari proses evolusi kebudayaan, yakni proses yang mencakup rangkaian usaha-usaha manusia untuk menyesuaikan diri atau memberi respon terhadap perubahan lingkungan fisik maupun sosial yang terjadi secara temporal (Mulyadi, 2007 dalam Helmi dan Satria, 2012). Dalam kehidupannya, manusia hidup dengan alam secara timbal balik, yakni bagaimana manusia beradaptasi dengan alam agar tetap bertahan demi keberlangsungan hidupnya dengan mengalihkan energi dari alam pada dirinya. Adaptasi merupakan sifat sosial dari setiap manusia yang akan muncul akibat adanya kebutuhan tujuan, dan hasrat para individu.

Menurut Vayda dan Rappaport dalam Mulyadi (2007) dikutip oleh Sugihardjo, dkk (2012), adaptasi manusia dapat dilihat secara fungsional dan prosesual. Adaptasi fungsional merupakan respon suatu organisme atau sistem yang bertujuan untuk mempertahankan kondisi stabil (homostatis). Sedangkan adaptasi prosesual merupakan sistem tingkah laku yang dibentuk sebagai akibat dari proses penyesuaian manusia terhadap perubahan-perubahan lingkungan disekitarnya.

Strategi adaptasi lain, dilakukan dengan menciptakan, mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial yang telah membentuk suatu jaringan sosial. Mitchel (1969) yang dikutip oleh Fachrina, dkk. (2010), menyatakan bahwa jaringan sosial merupakan seperangkat hubungan khusus yang terbentuk diantara sekelompok orang. Pemanfaatan jaringan sosial merupakan hal yang paling mudah untuk dilakukan oleh masyarakat miskin untuk mengatasi kesulitan dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi jaringan sosial adalah untuk memudahkan

anggota-anggotanya memperoleh akses ke sumber daya ekonomi yang tersedia di lingkungannya. Jaringan sosial dapat dibentuk berdasarkan basis kerabat, tetangga, pertemanan, atau campuran dari unsur-unsur tersebut.

Ada empat bentuk kekuatan hubungan yang dapat dilihat dari suatu jaringan sosial: 1) *Intensity*, kekuatan hubungan dapat diukur dari derajat atau frekuensi kontak individu dalam komunitas tersebut pada waktu tertentu. 2) *Reciprocity*, derajat individu-individu dalam komunitas tersebut untuk melakukan pertukaran secara timbal balik. 3) Kejelasan terhadap pengharapan dari hubungan yang terjalin antar individu dalam komunitas yang diamati. 4) *Multiplexity*, derajat jenis banyak peran yang dilakoni oleh individu dalam komunitas atau pranata yang diamati (Rudito dan Famiola, 2008 dalam Sugihardjo, dkk., 2012).

Keterkaitan individu-individu dalam hubungan-hubungan sosial adalah pencerminan dirinya sebagai makhluk sosial. Dalam kehidupan masyarakat, hubungan-hubungan sosial yang dilakukan individu merupakan upaya untuk mempertahankan keberadaannya. Setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal kuantitas maupun kualitas atau intensitas hubungan-hubungan sosial yang dilakukannya, sekalipun dalam kehidupan masyarakat terbuka luas peluang bagi individu untuk melakukan hubungan sosial secara maksimal.

Hubungan-hubungan tersebut tidak hanya melibatkan dua individu, tetapi juga banyak individu. Keterhubungan antar individu-individu tersebut akan membentuk suatu jaringan sosial, yang sekaligus merefleksikan terjadinya pengelompokan sosial dalam kehidupan masyarakat. Pengertian jaringan tersebut

mengacu pada hubungan-hubungan yang teratur, konsisten, dan berlangsung dalam jangka yang relatif lama.

Teori jaringan dalam perspektif sosiologi ekonomi adalah keterlekatan perilaku ekonomi dalam hubungan sosial dapat dijelaskan melalui jaringan sosial yang terjadi dalam kehidupan ekonomi, yang dapat dilihat bagaimana individu terkait antara satu dengan lainnya dan bagaimana ikatan afiliasi melayani baik sebagai pelicin untuk memperoleh sesuatu yang dikerjakan maupun sebagai perekat yang memberikan tatanan dan makna pada kehidupan sosial.

Sebagai suatu proses perubahan, adaptasi dapat berakhir dengan sesuatu yang diharapkan atau tidak diharapkan. Oleh karenanya, adaptasi merupakan suatu sistem interaksi yang berlangsung terus antara manusia dengan manusia, dan antara manusia dengan ekosistemnya. Dengan demikian, tingkah laku manusia dapat mengubah suatu lingkungan atau sebaliknya, lingkungan yang berubah memerlukan suatu adaptasi yang selalu dapat diperbaharui agar manusia dapat bertahan dan melangsungkan kehidupan di lingkungan tempat tinggalnya (Bennett 1976 dalam Helmi dan Satria, 2012).

Soekanto (2000) memberikan beberapa batasan pengertian dari adaptasi sosial, yakni: 1) Proses mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2) Penyesuaian terhadap norma-norma untuk menyalurkan ketegangan. 3) Proses perubahan untuk menyesuaikan dengan situasi yang berubah. 4) Mengubah agar sesuai dengan kondisi yang diciptakan. 5) Memanfaatkan sumber yang terbatas untuk kepentingan lingkungan dan sistem. 6) Penyesuaian budaya dan aspek lainnya sebagai hasil seleksi ilmiah.

Lebih lanjut, Aminuddin (2000) menyebutkan bahwa penyesuaian dilakukan dengan tujuan-tujuan tertentu, diantaranya: 1) Mengatasi halangan-halangan dari lingkungan. 2) Menyalurkan ketegangan sosial. 3) Mempertahankan kelanggengan kelompok atau unit sosial. 4) Bertahan hidup.

Dari batasan-batasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa adaptasi merupakan proses penyesuaian. Penyesuaian diri individu, kelompok, maupun unit sosial terhadap norma-norma, proses perubahan, ataupun suatu kondisi yang diciptakan. Adaptasi pada penelitian ini meliputi berbagai tindakan yang dilakukan oleh para PKL anggota Paguyuban PKL Makmur untuk dapat tetap berjualan di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya, tepatnya di lahan kosong milik Pemerintah Kota yang berada di sebelah utara masjid. Berbagai tindakan yang dilakukan para PKL tergolong menjadi tindakan yang dilakukan secara individu maupun secara kelompok/kolektif. Sesuai dengan konsep adaptasi bahwa tindakan penanggulangan muncul setelah adanya permasalahan yang ada di sekitar masyarakat. Masalah pada penelitian ini adalah mengenai adanya berbagai tindakan dari pihak di luar para PKL, baik dari pemerintah maupun manajemen Masjid Al Akbar yang tidak menghendaki lahan di sebelah utara masjid tersebut dijadikan tempat berjualan para PKL. Setelah terjadi masalah seperti ini, para PKL mengupayakan tenaga, biaya, dan juga waktu untuk dapat menemukan pemecahan masalah terbaik untuk dapat menyelesaikan permasalahan terkait dengan penggunaan lahan untuk berjualan tersebut.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus. Pada dasarnya penelitian dengan jenis studi kasus bertujuan untuk mengetahui tentang sesuatu hal secara mendalam. Maka dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode studi kasus untuk faktor-faktor yang mendorong para PKL untuk berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya dan Bagaimanakah strategi adaptasi dari para PKL untuk tetap dapat berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya.

1.6.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif (*qualitative research*). Bogdan dan Taylor (Moleong, 2007) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Sukmadinata (2006) menyatakan bahwa penelitian kualitatif (*qualitative research*) adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individu maupun kelompok. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti dapat dengan mudah untuk mendapatkan informasi dan data yang jelas serta terperinci mengenai strategi adaptasi pedagang kaki lima di sekitar Masjid Al Akbar Surabaya, serta melihat secara langsung kegiatan berjualan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima tersebut.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi ini dilakukan secara *purposive* atau sengaja, karena secara langsung penelitian ini berlokasi Masjid Al Akbar Surabaya. Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi di Pemanfaatan Masjid Al Akbar Surabaya dengan pertimbangan karena masjid Al Akbar merupakan tempat ibadah dan menjadi tempat wisata religi yang banyak dikunjungi orang, yang kemudian dimanfaatkan oleh para pedagang kaki lima untuk berjualan di lokasi tersebut.

1.6.3. Teknik Penentuan Informan

Pada penelitian kualitatif ini, penentuan informan ditentukan secara *purposive* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu yang dapat membantu proses penelitian. Informan adalah orang yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara sengaja dengan ketentuan bahwa yang dipilih sebagai informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2001). Adapun kriteria yang digunakan peneliti dalam menentukan informan adalah:

1. Pedagang Kaki Lima Murni

Penelitian ini menggunakan PKL yang menjalankan usahanya sendiri dengan modal yang terbatas, tidak mempunyai pekerjaan lain selain pedagang kaki lima, ketrampilan terbatas, dan walaupun dibantu orang lain, pembantunya tersebut merupakan anggota keluarganya sendiri.

2. Telah berjualan lebih dari 2 tahun di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya

Informan yang dipilih adalah PKL yang telah berjualan lebih dari 2 tahun di kawasan Masjid Al Akbar Surabaya, karena dengan lamanya waktu berdagang tersebut, diharapkan mereka akan lebih memahami persoalan yang mereka hadapi dalam berjualan di area tersebut serta bagaimana adaptasi mereka untuk menghadapi permasalahan tersebut.

3. Aktif berjualan dan tergabung dalam Paguyuban PKL Makmur Pagesangan

Informan yang dipilih adalah PKL yang aktif berjualan di lokasi yang selama ini seringkali dipermasalahkan oleh manajemen Masjid Al Akbar Surabaya. Informan dari paguyuban PKL Makmur Pagesangan ini sengaja dipilih karena merupakan kelompok yang seringkali terlibat perselisihan dengan manajemen Masjid Al Akbar Surabaya terkait dengan lokasi mereka berjualan.

Selain itu, peneliti juga menggunakan *Snowball Sampling* (bola salju) untuk menentukan informan. Dengan teknik ini, peneliti digiring berdasarkan data dari informan satu ke informan lainnya hingga data yang didapatkan mencukupi. Maksud mencukupi yaitu data yang didapatkan sudah mencapai titik jenuh atau sama.

Penentuan informan dilakukan dengan terlebih dahulu melakukan observasi para PKL yang berjualan di sekitar Masjid Al Akbar tersebut. Dari hasil observasi awal, maka peneliti merasa perlu juga untuk mewancarai Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, karena segala hal terkait PKL di lokasi tersebut berhubungan dengan Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan tersebut. Dari seluruh PKL yang ada, sesuai dengan kriteria yang ditentukan

tersebut, peneliti mendapatkan 6 orang informan, termasuk Ketua PKL Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, yang bersedia untuk diwawancarai, yaitu:

1. Ibu Siti Rumiwati, SH., 53 tahun, adalah Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Beliau adalah orang yang mengupayakan agar para PKL ini dapat berjualan di lokasi yang dipermasalahkan manajemen Masjid Al Akbar tersebut sejak sekitar tahun 2011. Beliau juga yang selama ini mengkoordinir segala urusan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh para PKL anggotanya.
2. Ibu Lastri, 45 tahun, adalah pedagang makanan sego sambel iwak kali. Beliau juga telah berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar ini sejak lama, bahkan sebelum adanya Paguyuban PKL Makmur Pagesangan.
3. Bapak Brodin, 45 tahun, adalah pedagang makanan sego sambel wader pari. Sebelumnya beliau berjualan di kawasan Mangga Dua Jagir, dan mulai berjualan di sekitar Masjid Al Akbar ini sejak tahun 2011.
4. Bapak Rakidin, 49 tahun, adalah pedagang makanan kikil sapi dan siomay. Beliau telah berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar ini sejak lama, bahkan sebelum adanya Paguyuban PKL Makmur Pagesangan.
5. Bapak Budi, 35 tahun, adalah pedagang pakaian. Sebelumnya beliau berjualan di kawasan Lapangan Kodam V Brawijaya, dan baru pindah ke area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya pada awal tahun 2012
6. Ibu Anik, 31 tahun, adalah pedagang jajanan. Beliau telah berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar ini sejak lama, bahkan sebelum adanya Paguyuban PKL Makmur Pagesangan.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan cara:

1. Observasi

Pengumpulan data dengan mengamati langsung di lapangan. Proses ini berlangsung dengan pengamatan yang meliputi melihat, merekam, menghitung, mengukur, dan mencatat kejadian. Observasi ini merupakan kegiatan yang meliputi pencatatan secara sistematis kejadian-kejadian, perilaku, obyek-obyek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan. Pengamatan dilakukan untuk mengetahui kegiatan sehari-hari para pedagang kaki lima dalam berjualan, mulai dari persiapannya, interaksinya dengan pembeli dalam menjual barang, hingga selesai mereka menutup lapaknya. Pengamatan dilakukan pada baik pada malam hari maupun pada hari minggu pagi saat para pedagang menggelar dagangannya.

Observasi pertama dilakukan peneliti pada tanggal 18 September 2013. Pertama yang dilakukan peneliti adalah kegiatan para PKL yang berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya. Dari hasil pengamatan ini peneliti mengetahui bahwa terdapat beberapa kelompok PKL di kawasan ini, yaitu di Sentra PKL Gayungan, PKL di tanah milik Pemerintah Kota Surabaya di sisi utara Masjid Al Akbar Surabaya yang biasa digunakan sebagai area parkir jama'ah Masjid Al Akbar, dan di depan Masjid Al Akbar, tepatnya di trotoar depan Masjid Al Akbar Surabaya.

Observasi berikutnya dilakukan pada 25 Oktober 2013. Pada kesempatan ini, peneliti melakukan wawancara awal dengan beberapa PKL yang ditemui di beberapa lokasi tersebut. Dari hasil wawancara ini peneliti mengetahui bahwa para PKL di ketiga lokasi di sekitar Masjid Al Akbar Surabaya tersebut berada di bawah pengelolaan yang berbeda. Sentra PKL Gayungan didirikan dan dikelola pihak Pemerintah Kota Surabaya, PKL di lahan kosong sisi utara di kelola Paguyuban PKL Makmur Pagesangan, dan yang berada di trotoar depan Masjid Al Akbar berhubungan dengan pihak manajemen Masjid Al Akbar. Berikutnya peneliti juga mengetahui bahwa PKL yang menempati lahan kosong di sisi utara Masjid Al Akbar ini merupakan kelompok yang dianggap menyerobot lahan parkir Masjid Al Akbar sehingga seringkali bermasalah dengan manajemen Masjid Al Akbar Surabaya. Berdasarkan kondisi tersebut, peneliti selanjutnya tertarik untuk lebih fokus pada kelompok karena dianggap merupakan kelompok PKL yang paling sulit untuk bertahan dan terus berjualan di lokasi tersebut.

2. Wawancara mendalam (*Depth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan suatu hal yang penting dalam proses pengumpulan data setelah observasi. Tujuan wawancara mendalam agar peneliti dapat menggali informasi yang dibutuhkan. Wawancara secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 2001).

Wawancara mendalam dilakukan dengan bahasa yang sederhana agar peneliti dan informan tidak mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Wawancara mendalam dilakukan pada keadaan yang santai, luwes, tidak berada dalam tekanan agar tercipta hubungan yang akrab dan kekeluargaan antara peneliti dan informan. Peneliti juga mengembangkan pedoman wawancara agar mendapatkan data yang lebih terperinci sehingga dapat mendukung data dengan lebih baik. Penggunaan alat bantu rekam yang berupa *voice recorder* digunakan peneliti agar dapat membantu ketika proses wawancara berlangsung karena terbatasnya daya ingat peneliti serta untuk mengingat hal-hal penting yang disampaikan oleh informan.

Sebelum melakukan wawancara resmi dengan para informan yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti melakukan wawancara tidak resmi dengan seorang tukang parkir bernama Fadli di lokasi penelitian untuk mengetahui siapa Ketua Paguyuban PKL Makmur Pagesangan. Beliau kemudian mempertemukan peneliti dengan Ibu Rumiwati, SH, atau yang biasa disapa Bu Tommy, di sebuah warung milik Bapak Mail. Peneliti kemudian melakukan wawancara dengan Ibu Siti Rumiwati di warung tersebut. Wawancara tersebut dilakukan pada tanggal 8 Oktober 2014, pukul 19.45 di sela-sela kegiatan Ibu Rumiwati untuk memungut iuran harian dari para PKL. Wawancara hanya dilakukan sekitar 45 menit, karena Ibu Rumiwati berpamitan untuk melanjutkan kegiatannya.

Wawancara kedua dilakukan dengan Ibu Lastri, pemilik warung sego sambel iwak kali. Wawancara dilakukan di warungnya, yaitu lokasi yang sama

dengan tempat peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Rumiwati, SH., pada tanggal 8 Oktober 2014. Wawancara dimulai pada pukul 21.00, setelah Bu Siti meninggalkan warung tersebut untuk melanjutkan kegiatannya. Pada saat wawancara, warung dalam keadaan sepi, sehingga tidak mengganggu aktivitas berjualan Ibu Latri. Selain itu Ibu Latri juga dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan peneliti selama sekitar 35 menit dengan tenang dan jelas.

Wawancara ketiga dilakukan dengan Bapak Brodin, pemilik warung sego sambel wader pari. Wawancara dilakukan di warungnya, pada tanggal 9 Oktober 2014. Wawancara dimulai pada pukul 19.30. Namun sebelum peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan pokok, ada pembeli yang datang, sehingga wawancara tertunda karena Pak Brodin harus melayani pembeli. Peneliti kemudian memutuskan untuk mewawancarai pedagang lain yang ada di sebelah warung Pak Brodin, yaitu Bapak Rakidin. Setelah wawancara dengan Pak Rakidin selesai, peneliti kembali ke warung Pak Brodin dan melanjutkan wawancara pada pukul 20.45. Pada kesempatan kedua wawancara berlangsung karena tidak ada lagi pembeli. Wawancara ini hanya berlangsung sekitar 15 menit lamanya.

Wawancara keempat dilakukan dengan Bapak Rakidin, pemilik warung kikil sapi dan siomay. Wawancara dilakukan di sela wawancara dengan Bapak Brodin yang harus melayani pembelinya. Wawancara dilakukan pada tanggal 9 Oktober 2014, pukul 19.40. Di sela wawancara, Bapak Rakidin sempat beberapa melayani pembeli, namun tidak terlalu mengganggu proses

wawancara yang dilakukan, dan tetap dapat menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti. Wawancara dengan Pak Rakidin ini dilakukan selama sekitar 45 menit.

Wawancara kelima dilakukan dengan Bapak Budi, pemilik lapak penjual pakaian. Wawancara dilakukan pada tanggal 26 Oktober 2014, pukul 09.30. Proses wawancara berlangsung lancar selama 30 menit, meskipun beberapa kali Pak Budi harus menawarkan dagangannya kepada para pembeli maupun melayani para pembeli yang datang.

Wawancara keenam dilakukan dengan Ibu Anik, pedagang yang berjualan berbagai macam makanan seperti sosis, tempura, nugget dan sebagainya serta berbagai macam es. Wawancara dilakukan pada hari Minggu pagi tanggal 2 November 2014 pukul 09.15. Wawancara berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 45 menit karena sering terputus akibat adanya pembeli yang datang.

1.6.5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengaluran secara sistematis atau data-data yang telah terkumpul untuk memudahkan pemahaman dan penyusunan laporan. Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan dalam bentuk rekaman informan ditranskrip terlebih dahulu ke dalam sebuah catatan. Kemudian data hasil transkrip wawancara, observasi, internet, buku, dan jurnal diolah untuk dikelompokkan untuk mempermudah proses memasukkan data sesuai permasalahan penelitian. Setelah itu data dapat

dikategorisasi untuk selanjutnya dilakukan analisis atas data tersebut. Analisis data kemudian dilakukan berdasarkan kategorisasi dan fokus masalah dalam penelitian, yaitu untuk mengungkap faktor-faktor yang mendorong para PKL untuk berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya dan strategi adaptasi dari para PKL untuk tetap dapat berjualan di area sekitar Masjid Al Akbar Surabaya tersebut.

